

Rendahnya Dukungan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Barat, Indonesia

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2021, Vol. 11, No. 1: 133-154
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2021

Fadli Afriandi*

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstrak

Secara nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan partai kuat yang mampu menjadi pemenang dalam pemilu 1999, 2014 dan 2019. Namun, perolehan suara untuk partai ini cenderung rendah dan tidak pernah menjadi pemenang di tingkat daerah seperti di Provinsi Sumatera Barat. Artikel ini menjelaskan mengapa PDI Perjuangan memperoleh suara rendah di Sumatera Barat dalam pemilihan umum dengan menggunakan pendekatan konsep populisme. Data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan, dan dianalisis dengan penelitian kualitatif. Artikel ini berargumen bahwa rendahnya suara PDI Perjuangan di Sumatera Barat disebabkan oleh kurang populisnya partai ini bagi masyarakat Sumatera Barat. PDI Perjuangan dianggap kurang sensitif dengan karakter masyarakat Minangkabau, identitas dan kebijakannya tidak sesuai dengan selera masyarakat, dan rekam jejaknya yang kurang bagus bagi masyarakat di Sumatera Barat. Ini berdampak pada rendahnya perolehan suara Joko Widodo di Sumatera Barat dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan dianggap memiliki gaya dan karakter yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Sumatera Barat dan kebijakannya dianggap masih belum berpihak pada masyarakat kecil.

Kata-kata Kunci

Kekalahan partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pemilu, populisme, Sumatera Barat

Abstract

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) is a strong party in Indonesia winning three presidential elections in 1999, 2014 and 2019. However, it got low people's votes in

* Penulis untuk korespondensi:

Fadli Afriandi

Alamat: Jl. Asoka No. 06, Jorong Ambacang Anggang, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia

Email: fadliafriandii@gmail.com

some provinces like Sumatera Barat. This article explains why PDI Perjuangan got little votes in Sumatera Barat by using the concept of populism as its analytical framework. The required data were collected through interviews and literature study, and were analyzed through qualitative approach. This article argues that the loss of PDI Perjuangan in presidential elections in Sumatera Barat is closely related to the people's perception of the party as less populist than its competing parties. The people of Sumatera believed that PDI Perjuangan had no sensitivity to their unique characteristics and developed party identities and policy that were considered in contradiction with their social and cultural background. This impacted on Joko Widodo's low support and votes in 2014 and 2019 presidential elections. He was perceived to have leadership style and characteristics that were not in line with the expectation of Sumatera Barat people, and have issued policies considered unsupportive of people interest.

Key Words

Election, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, party loss, populism, West Sumatra

Pendahuluan

Di Era Reformasi, Indonesia telah lima kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang dimulai pada tahun 1999 dan dilanjutkan interval lima tahun setelahnya, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada pemilu 1999, partai politik pemenang adalah PDI Perjuangan dengan 33,74% suara. Namun, pada pemilu 2004 PDI Perjuangan gagal mempertahankan posisinya dikalahkan oleh Partai Golkar yang meraih 21,58% suara dan juga pada 2009 dikalahkan oleh Partai Demokrat yang berhasil memperoleh 20,85% suara. Pada dua pemilu berikutnya, PDI Perjuangan kembali merebut posisi juara. PDIP meraih 18,95% suara pada pemilu 2014 (Hakim 2018) dan 19,91% suara pada pemilu 2019. Dengan demikian, sejauh ini dari lima kali pemilu pasca runtuhnya Orde Baru, PDI Perjuangan memperoleh tiga kali kemenangan di tingkat nasional.

Namun, kemenangan PDI Perjuangan di level nasional tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh di daerah. Di Sumatera Barat, misalnya, PDI Perjuangan tidak pernah berhasil menjadi juara. Pada 1999 dan 2004, Golkar menjadi pemenang pemilu di Sumatera Barat dan pada 2009 posisi Golkar digeser oleh Partai Demokrat (“Tradisi Perolehan

Kursi DPR di Sumbar dalam Tiga Pemilu Terakhir”). Pada 2014, Partai Golkar menjadi pemenang (KPU Sumatera Barat, 2014) dan pada pemilu 2019 dimenangi oleh Partai Gerindra. Selama pemilu tersebut, tercatat baru empat kader PDI Perjuangan duduk di pusat, dua kursi tahun 1999 dan 2 kursi di tahun 2014 (“Perbandingan Kursi DPR RI Asal Sumbar Sejak Pemilu 1999 Hingga 2019”).

Kekalahan yang dialami oleh PDI Perjuangan ini tidak hanya dalam merebutkan kursi di parlemen. Pada 2014 dan 2019, PDI Perjuangan mengusung kadernya, Joko Widodo yang lebih dikenal dengan nama Jokowi, menjadi calon presiden. Pengusungan Joko Widodo ini tidak disambut baik oleh masyarakat Sumatera Barat. Pada 2014, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla dan memperoleh 539.308 suara atau 23,08%. Pada 2019, berpasangan dengan Ma’ruf Amin, Jokowi hanya berhasil memperoleh 407.761 suara atau 14,08%.

Meskipun Jokowi kalah di Sumatera Barat di pemilihan presiden 2014, Jokowi tetap melakukan pembangunan di wilayah ini seperti pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, kereta api Bandar Udara Minangkabau, dan revitalisasi seribu rumah gadang (Febrianto 2019). Selain itu, ada beberapa proyek prioritas Jokowi di Sumatera Barat seperti jalan penghubung Solok Selatan dengan Tanah Datar, akses jalan ke wisata Mandeh, dan proyek jalan Trans Mentawai (Jannah 2018). Jokowi juga melakukan pendekatan dengan Sumatera Barat dengan cara lain seperti Shalat Idul Fitri pada 2016 di Masjid Raya Sumatera Barat (Sinombor 2016). Ibu Negara Iriana juga menarik perhatian dengan mengenakan pakaian khas Minangkabau, suku terbesar di Sumatera Barat. Ia mengenakan baju khas Minang dua, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017 (“Cantiknya Ibu Negara Iriana Jokowi Pakai Baju Adat Minang, Ini Kata Netizen”) dan 2018 (Wulan 2018). Namun, itu semua tidak menarik mayoritas masyarakat Sumatera Barat memilih Jokowi sebagai presiden dan mendukung PDI Perjuangan.

Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan keheranannya terkait rendahnya dukungan masyarakat Sumatera Barat kepada partainya. Pada saat pengumuman calon kepala daerah yang usung partainya di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, ia berkata:

Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP. Kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis yang pada waktu itu kerja sama dengan Bung Karno seperti Bung Hatta yang sebenarnya datang dari Sumbar (“Megawati Bingung Kenapa Warga Sumbar Tak Suka PDIP”).

Fakta politik tentang PDI Perjuangan di Sumatera Barat di atas sungguh menarik dan penting untuk dikaji lebih dalam mengapa itu bisa terjadi. Karena itu, artikel ini mencoba untuk menjelaskan mengapa PDI Perjuangan kurang mendapat dukungan dari masyarakat Sumatera Barat dengan melihat pada faktor-faktor latar belakang sosial, budaya dan politik masyarakat Sumatera Barat.

Kajian mengenai kekalahan sebuah partai telah banyak dilakukan. Riyanto (2020) mengkaji kekalahan partai berideologi Islam dengan perspektif institusionalisme historis. Abidin dan Sultan (2011) menjelaskan partai nasionalis dengan fokus Partai Golkar dengan perspektif strategi kampanye politik dan analisis SWOT. Di negara lain, Kamboja, misalnya, yang menerapkan sistem pemilu otoriter terdapat, kekalahan *Cambodia People's Party* dianalisis menggunakan teori *Dominant Party Authoritarian Regimes* dan konsep pengawas pemilu internasional (Fajari 2017).

Berkaitan dengan PDI Perjuangan, beberapa tulisan berupaya membahas kekalahan partai ini. Ekawati (2017) dalam tulisannya yang berjudul "Vonis dan Kekalahan Ahok Berefek Luas Terhadap Elektabilitas Partai PDI Perjuangan" menjelaskan kekalahan PDI Perjuangan dilihat dari sisi hukum yang melihat efek domino yang terjadi pasca penetapan kadernya terjerat masalah hukum. Dengan menggunakan pendekatan marketing politik, Sutisna (2016) menjelaskan bahwa kekalahan PDI Perjuangan disebabkan karena tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip marketing politik sehingga gagal dalam memperoleh kemenangan. Analisis yang sama digunakan dalam kasus kekalahan PDI Perjuangan di Banda Aceh (Rinaldi 2015). Dengan pendekatan perilaku pemilih, Nuryani dan Harsasto (2018) membahas kekalahan PDI Perjuangan di Kabupaten -dengan Desa Teter dan Wates sebagai lokasi penelitian- yang merupakan basis PDI Perjuangan membawa kadernya menjadi bupati. Terakhir, kekalahan PDI Perjuangan di Kabupaten Sleman di tahun 2015 dibahas oleh Fajri dan Fadillah (2017) dengan menggunakan pendekatan komunikasi politik.

Kajian-kajian di atas tentu saja sangat signifikan dalam memahami kekalahan PDI Perjuangan. Untuk melengkapi kajian di atas, artikel ini hendak berkontribusi atas kajian tentang kekalahan partai politik besar ini dengan menggunakan konsep populisme sebagai kerangka teoritiknya.

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Disajikan secara naratif, data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah warga masyarakat Sumatera Barat yang telah memilih pada saat pemilu 2014 dan

2019 baik untuk legislatif maupun eksekutif. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dari jurnal, buku, media massa online, berita dari televisi, dan situs-situs resmi. Setelah data diperoleh, berikutnya dilakukan analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana 2014:12-14).

Konsep populisme masih dalam perdebatan para ilmuwan politik dan jauh dari sebuah pendefinisian tunggal (Colliot & Thelene 2019:17). Edwin Williamson (dalam Edwards 2010:167) mendefinisikan populisme sebagai cara politisi untuk menarik dukungan massa dengan memberi janji dan konsensi kepada masyarakat seperti perubahan sosial dan ekonomi. Matthijs Rooduijn, Sarah L. de Lange dan Wouter Van der Brug (dalam Rahman 2019:10) mendefinisikan populisme dalam kaitannya dengan empat hal: berhubungan dengan masyarakat sipil, masyarakat sipil sebagai pengkritik penguasa (elit), berada di lingkungan masyarakat yang homogen, dan ada persolan genting yang harus diselesaikan meskipun belum tentu kebenarannya. Noam Gidron dan Bart Bonikowski (dalam Rahman 2019:11-16) memaknai populisme secara lebih luas dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga populisme dapat dilihat sebagai ideologi, gaya diskursif, dan strategi politik. Pertama, populisme dari segi ideologi yang membahas mengenai rakyat sebagai aktor yang baik dan satu, kedaulatan berada di tangan rakyat, pentingnya nilai budaya dan cara hidup rakyat, dan adanya persatuan yang terjalin antara rakyat dengan partai dan pemimpin. Kedua, populisme dalam gaya diskursif yang melihat populisme lebih kepada gaya komunikasi aktor politik (*political talk*) yang dilihat dari mimik atau keterampilan berbahasanya. Komunikasi politikus tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sehingga mudah dimengerti oleh publik. Ketiga, populisme dilihat sebagai strategi politik berfokus ada usaha memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya sehingga populisme jenis ini akan berkonstruksi kepada pilihan kebijakan, organisasi politik, dan mobilisasi.

Dari banyaknya definisi mengenai populisme, dapat dikatakan bahwa populisme hadir karena adanya usaha aktor politik untuk menjalin kedekatan dengan rakyat melalui pengaplikasian program yang pro-rakyat (Weylan 2001), mobilisasi politik, penggunaan retorika dan penggunaan hal-hal yang mampu memotivasi masyarakat (Edward 2010:167). Secara sederhana, populisme berhubungan dengan upaya bagaimana rakyat (yang diasumsikan baik) melawan para elit yang korup atau tidak bermoral (Brubaker 2017). Populisme biasanya dipimpin oleh tokoh yang

berkarisma dan berwibawa. Aktor tersebut menarik perhatian masyarakat dengan mengangkat isu-isu rakyat yang harus diperjuangkan.

Dari sisi gaya, populisme memiliki beberapa jenis: pertama, kediktatoran populis yang melihat aktor politik memiliki karisma yang berbeda dari politisi konvensional; kedua, gaya demokrasi populis yang berkomitmen bahwa kekuasaan adalah milik rakyat; ketiga, populisme reaksioner di mana aktor politik berpihak ke prasangka massa untuk melawan pandangan bagus dari elit lain seperti kepopuleran yang diperoleh dari mengangkat masalah etnis atau kelompok sayap kanan; dan keempat, populisme kaum politisi di mana aktor politik berbicara atas nama rakyat umum (Haboddin 2019:175). Selain itu, terdapat populisme “wong cilik” yang berorientasi kepada rakyat kecil dan selalu berprasangka terhadap pemerintah atau pengusaha besar (Budiarti, Haboddin, dan Setiawan 2018: 39).

Suksesnya populisme dipengaruhi oleh penggunaan strategi yang tepat. Dalam hal strategi, populisme dibedakan atas dua macam, yaitu populisme rasional dan populisme irasional. Perbedaan kedua jenis populisme tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Kondisi Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik Masyarakat Sumatera Barat

Sumatera Barat merupakan wilayah yang dihuni sebagian besar oleh suku Minangkabau yang merupakan suku asli wilayah ini. Lebih dari 80% populasi Sumatera Barat berasal dari Suku Minangkabau (Effendi 2014:109). Suku Minangkabau adalah suku asli Sumatera Barat yang masuk kategori mayoritas. Ada suku asli yang termasuk suku minoritas, yaitu Suku Mentawai yang mendiami Kabupaten Kepulauan Mentawai (Effendi 2014:109). Selain suku asli, di Sumatera Barat terdapat beberapa suku pendatang yang hidup rukun, yaitu Nias, Aceh, Batak, Jawa, Sunda, Palembang, Lampung, Bugis, Maluku, Papua, Tionghoa dan India (Effendi 2014: 109; Eriyanti 2013:77). Meskipun ada suku-suku pendatang, adat Minangkabau sangat mendominasi pergaulan sosial masyarakat di Sumatera Barat. Karena itu, konteks sosial masyarakat Sumatera Barat berkarakter budaya Minangkabau. Besarnya pengaruh suku Minangkabau membuat pemerintah Sumatera Barat membangun provinsi ini dengan berorientasi pada suku mayoritas tersebut. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam penggunaan sisten *nagari* yang merupakan satuan peling rendah, tapi utama di masyarakat Sumatera Barat (Effendi 2014:109). Maka, membicarakan Sumatera Barat sama halnya dengan membicarakan orang Minangkabau.

Dalam menjalani hidup mereka, masyarakat Sumatera Barat mempunyai filosofi hidup yang dikenal dengan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK). Maksudnya adalah adat Minangkabau merupakan adat yang menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup mereka (Kosasih 2013:111). Menurut data dari Kementerian Agama, penduduk Sumatera Barat mayoritas beragama Islam, yaitu berjumlah 5.306.390 jiwa atau 98% dari total keseluruhan populasi (“Kementerian Agama Sumatera Barat dalam Angka”). Kuatnya ajaran Islam yang diadopsi ke dalam adat menjadikan Islam sebagai identitas orang Minangkabau. Tidak hanya Minangkabau diidentikkan dengan Islam, Sumatera Barat juga sudah menjadi sebuah provinsi yang mana Islam menjadi komponen penting dalam identitas Sumatera Barat (Salim dan Kryati 2017: 52).

Agama dan politik di Sumatera Barat memiliki hubungan yang akur. Agama dan politik menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Sejak kemerdekaan Indonesia, agama telah menjadi bagian penting pemerintahan di Sumatera Barat. Begitu juga dengan para tokoh dan institusi agama yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Ini terjadi karena tokoh agama terlibat di lembaga-lembaga pemerintahan seperti yudikatif, legislatif dan eksekutif. Selain itu, peran tokoh dan institusi agama di Sumatera Barat memberikan rekomendasi terhadap calon kepala daerah (Salim dan Kryati 2017:53).

Masyarakat Sumatera Barat hampir sama dengan masyarakat Indonesia umumnya yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan. Sektor pertanian di Sumatera Barat merupakan lapangan usaha yang besar termasuk di dalamnya kehutanan dan perikanan. Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling besar, yaitu sebesar 22,17%. Perdagangan skala besar dan kecil serta reparasi kendaraan bermotor sektor merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh 15,80% masyarakat, dan transportasi perdagangan oleh 12,60% penduduk (“BPS: Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2019 Alami Perlambatan”).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Barat pada tahun 2019 mencapai angka 72,39. Dari segi pembangunan manusia, Sumatera Barat berada di posisi ke sembilan di Indonesia. Dengan angka tersebut, status pembangunan manusia di Sumatera Barat dikategorikan tinggi (“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada Tahun 2019 Mencapai 71,92”). Dari komponen melek huruf, di Sumatera Barat dapat dilihat dari dua wilayah. Di wilayah perkotaan, tingkat melek huruf penduduk di atas usia 10 tahun sebesar 99,46% dan untuk pedesaan sebesar 98,55%.

Kepemimpinan Jokowi dan Masyarakat Sumatera Barat

Jokowi mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo dengan beberapa gebrakannya. Jokowi sering muncul di media nasional dan diberitakan dengan positif. Setelah berhasil di Solo, Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta. Jokowi tidak menyelesaikan masa tugasnya sebagai gubernur Jakarta karena Jokowi maju sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan pada 2014. Berpasangan dengan Jusuf Kalla, Jokowi memenangkan pemilihan presiden 2014 dan menjadikannya sebagai presiden ketujuh Indonesia. Kemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2014 disebabkan oleh pandangan bahwa ia seorang yang populis atau pemimpin yang berpihak kepada rakyat (Sianipar 2015:17). Kehadiran Jokowi sebagai pemimpin baru di Indonesia memang berbeda dengan presiden sebelumnya. Jokowi adalah pemimpin yang berasal bukan dari kalangan ningrat, bukan militer, bukan ketua umum sebuah partai, dan juga bukan berasal dari keluarga kaya. Jokowi berprofesi sebagai pengusaha mebel yang jauh dari keriuhan politik (Sianipar 2015:18). Kemenangan Jokowi terulang di pemilihan presiden 2019 dengan mengalahkan lawan yang sama di 2014, yaitu Prabowo Subianto (Tabel 2).

Keberhasilan Jokowi sebagai presiden Indonesia pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 tidak berbanding lurus dengan suara yang diperoleh di Sumatera Barat. Sebagaimana dalam Tabel 3, perolehan suara Jokowi di pencalonan presiden kedua mengalami penurunan 8,99%. Penurunan suara Jokowi terjadi karena beberapa sebab. Pertama, kepemimpinan Jokowi bukan selera masyarakat Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat masih menganggap karakter pemimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih lebih baik dari Jokowi dilihat dari kewibawaan, ketegasan, dan latar belakangnya. Pemimpin yang berasal dari militer dirasa lebih cocok untuk memimpin ketimbang dari sipil. Hal ini juga berpengaruh kepada masyarakat yang cenderung memilih Prabowo Subianto dalam pilpres 2014 dan 2019. Kehadiran Jokowi dirasa kurang sesuai dengan selera masyarakat Sumatera Barat yang menyukai gaya kepemimpinan SBY. Kedua, masyarakat Sumatera Barat tidak menyukai orang-orang di lingkaran Jokowi. Sebagian besar informan menganggap bahwa Jokowi tidak begitu bermasalah, tapi memandang partai pengusung dan orang di sekitar Jokowi dirasa kurang baik dan arogan. Karena itu, muncul anggapan bahwa Jokowi hanya alat untuk memperoleh kepentingan kelompok tertentu.

Di tahun 2020, di tengah pandemik COVID-19 pemerintah mengambil kebijakan yang tidak konsisten dalam penanganan wabah dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi. Kebijakan yang disoroti tidak hanya terjadi era pandemi COVID-19, tetapi sebelum pandemik. Kebijakan ekonomi yang diambil Jokowi dirasa belum berpihak kepada masyarakat terutama di Sumatera Barat. Ketidakkonsistenan kebijakan Jokowi saat menghadapi pandemik menyumbangkan kesan negatif terhadap pemerintahan Jokowi. Selain itu, pelaksanaan pilkada 2020 juga menambah sorotan masyarakat terhadap pemerintah terutama keselamatan diri dari penyebaran virus. Dalam pilkada 2020, beberapa anggota keluarga besar Jokowi maju sebagai calon kepala daerah, yaitu Gibran Rakabuming (putra Jokowi), Bobby Nasution (menantu), Doli Sinomba Siregar (paman Bobby), dan Wahyu Purwanto (adik ipar Jokowi) (Iqbal 2020). Hal ini membuat masyarakat Sumatera Barat berpikir bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik

Rendahnya dukungan terhadap PDI Perjuangan di Sumatera Barat dan Penyebabnya

PDI Perjuangan merupakan partai nasional yang sukses pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998. Keberhasilan partai ini dapat dilihat pada keberadaannya sekarang baik di level nasional maupun daerah. PDI Perjuangan dalam lima pemilu pasca-Reformasi telah berhasil memperoleh kemenangan tiga kali, yaitu di tahun 2009, 2014, dan 2019 (Tabel 2)

Namun, kemenangan PDI Perjuangan di nasional tidak terlihat di Sumatera Barat. Di provinsi ini, PDI Perjuangan tidak pernah mengalami kemenangan dan sejak partai ini terbentuk hanya empat orang dari Sumatera Barat duduk di parlemen nasional. Partai ini mengumpulkan 103.069 suara di pemilu 2014 dan 132.588 suara di pemilu 2019.

Ditinjau dari konteks masyarakat Sumatera Barat, rendahnya dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap PDI Perjuangan dapat dijelaskan dengan melihat beberapa faktor penyebabnya. Setidaknya terdapat tiga hal yang menyebabkan tidak berhasilnya PDI Perjuangan meraih banyak suara di Sumatera Barat dalam beberapa pemilu pasca-Reformasi.

Kurang Sensitif dengan Karakter Masyarakat Sumatera Barat

Keberadaan PDI Perjuangan di Sumatera Barat dianggap kurang menarik bagi masyarakat Sumatera Barat. Fakta bahwa masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas memeluk Islam dan berkarakter Islam modernis kurang mampu ditangkap oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bukanlah partai berideologi agama khususnya Islam, melainkan berideologi nasionalis sehingga banyak tindakan dari partai ini yang dianggap menjauhi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kemashalatan ummat. Misalnya, penolakan PDI Perjuangan terhadap Undang-Undang Bank Syariah, Undang-Undang Ekonomi Syariah, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Al-Barbasy 2014), dan Peraturan Daerah (Perda) Syariah (“Peraturan Harus Sesuai Konstitusi, PDIP Tolak Perda Syariah”). Kentalnya masyarakat dengan karakter Islam modernis di Sumatera Barat dapat dilihat pada popularitas Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun demikian, masyarakat Sumatera Barat bukanlah masyarakat yang terkategori politik aliran karena partai berideologi nasional selain PDI Perjuangan sering menang di Sumatera Barat seperti Partai Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

Ketidaksukaan masyarakat Sumatera Barat terhadap PDI Perjuangan juga dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh kader partainya, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok. Tuduhan penistaan Islam oleh Ahok di tahun 2016 merupakan kasus yang membuat masyarakat Sumatera Barat melihat bahwa PDI Perjuangan berusaha melindungi Ahok. Meskipun Ahok pada saat kejadian bukanlah kader PDI Perjuangan, masyarakat Sumatera Barat mengenal Ahok sebagai orang dekat Jokowi. Kedekatan Ahok dan Jokowi terlihat ketika sama-sama maju sebagai pasangan di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Setelah Jokowi duduk sebagai presiden, hubungan Jokowi dan Ahok bagi masyarakat Sumatera Barat seperti sahabat. Sehingga Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan berusaha melindungi Ahok.

Hal lainnya adalah anggapan bahwa PDI Perjuangan terlibat dalam “kriminalisasi ulama” seperti Abdul Somad, Felix Siauw, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir dan pembubaran pengajian. Anggapan seperti membuat masyarakat Sumatera Barat menilai bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang anti terhadap Islam.

Identitas dan Kebijakan Partai

PDI Perjuangan merupakan partai berideologi nasionalis dan marhaenisme yang erat dengan nilai-nilai, jati diri, ide, dan perilaku politik Sukarno sang proklamator kemerdekaan (Geraldly 2019: 140). PDI Perjuangan tidak lepas dari pembelahan ideologi sebagaimana dikonsepsikan oleh Clifford Geertz yang membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok: santri, abangan, dan priyayi (Geertz 1976). Menurut Geertz, santri adalah kelompok yang taat kepada ajaran Islam, abangan adalah kelompok yang tidak begitu dekat dengan ajaran agama Islam tapi lebih ke budaya atau adat, dan priyayi adalah kelompok bangsawan. Dari ketiga kelompok tersebut, PDI Perjuangan masuk ke golongan abangan (Herdiansah, Junaidi dan Ismiati 2017:64). Partai-partai golongan abangan ini dipandang cenderung kepada partai nasionalis kiri termasuk di dalamnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun PDI Perjuangan hadir setelah PKI dibubarkan, terdapat kader PDI Perjuangan yang keturunan kader PKI seperti Ribka Tjiptaning yang menulis buku *Aku Bangga Jadi Anak PKI* (Ningtyas 2020).

Sensitivitas masyarakat Sumatera Barat terhadap PKI sudah lama terawat. Sejarah mencatat bahwa Sumatera Barat menjadi basis Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), sebuah gerakan yang muncul dipicu oleh antikomunisme yang terjadi akibat kegagalan pembangunan ekonomi era Sukarno dan kedekatan Soekarno dengan PKI (Maulida 2018:174-180). Sejarah masa lalu ini membuat PDI Perjuangan masih dianggap identik dengan PKI. Masyarakat Sumatera Barat melihat bahwa PDI Perjuangan adalah partai sarang komunis sehingga masyarakat Sumatera Barat tidak berkenan memilihnya. Trauma masa lalu terhadap PKI dan juga karakter dari identitas partai tersebut tidak cocok bagi masyarakat Sumatera Barat.

PDI Perjuangan juga memiliki slogan partai “wong cilik”, istilah Jawa yang berarti orang kecil. Slogan ini dianggap lebih tertuju kepada orang-orang di Jawa sehingga membuatnya tidak cocok bagi masyarakat Sumatera Barat. Meskipun secara konsep “wong cilik” merupakan slogan PDI Perjuangan dalam memperjuangkan rakyat kecil atau pro terhadap rakyat, masyarakat Sumatera Barat melihat bahwa banyak agenda dari partai ini justru tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ini dapat dilihat ketika berada di luar pemerintahan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDI Perjuangan selalu menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena akan memberatkan rakyat kecil. Namun, ketika berada di pemerintahan, PDI Perjuangan menyetujui kenaikan harga BBM. Contoh lainnya adalah disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketidakinginan masyarakat Sumatera Barat atas disahkannya UU tersebut tidak direspon dengan baik oleh pemerintah pusat dengan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa.

Membaca Rekam Jejak Partai

Masyarakat Sumatera Barat adalah pemilih rasional (“Tanggapi Pernyataan Megawati, Pengamat Politik Unand: Pemilih di Sumbar Rasional”). Hal ini juga didukung oleh lembaga survey Voxpol Center Research and Consulting yang menyatakan bahwa pemilih rasional di Sumatera Barat tergolong tinggi, yaitu 46,5% (Tarmizi 2020). Pemilih rasional, menurut Lau dan Redlawsk (dalam Afriandi 2019;63), merupakan pemilih yang memiliki kemampuan mengenal, menganalisis informasi mengenai aktor politik, dan memilih berdasar pada kepentingan diri pemilih.

Dalam hal ini, rendahnya dukungan masyarakat Sumatera Barat erat kaitannya dengan kiprah PDI Perjuangan di parlemen. Masyarakat Sumatera Barat menilai bahwa PDI Perjuangan di parlemen suka berubah sikap dalam membela rakyat. Saat di luar pemerintahan, partai ini sangat gencar membela hak rakyat. Namun, saat berada di dalam pemerintahan, PDI Perjuangan seperti kehilangan sikap pro-rakyat tersebut. Misalnya, soal harga BBM seperti yang telah diuraikan di atas, kritikan partai terhadap APBN yang habis untuk pembiayaan Aparatur Sipil Negara (ASN), hutang luar negeri, kenaikan tarif dasar listrik, impor beras, remisi untuk koruptor, dan juga privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti kasus Indosat di era Megawati. Kasus-kasus yang dulunya ditolak ketika menjadi bagian pemerintah berbalik didukungnya. Selain itu, kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di masa pemerintahan Megawati menambah kontribusi pesimisnya masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Beberapa kasus ini masih melekat di ingatan masyarakat Sumatera Barat sehingga citra PDI Perjuangan menjadi negatif hingga sekarang.

Kasus korupsi oleh kader PDI Perjuangan juga menjadi alasan bagi masyarakat Minangkabau untuk tidak memberi dukungan. Menurut ICW, PDI Perjuangan merupakan tiga besar partai terkorup sepanjang 2014-2019 dengan jumlah kader yang terkena kasus korupsi sebanyak 34 orang (“ICW: Golkar Partai Terkorup di DPR/DPRD Periode 2014-2019”). Masalah korupsi di Indonesia menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat sehingga banyak kasus korupsi di PDI Perjuangan menjadi pertimbangan untuk tidak memilihnya dalam pemilihan umum.

Selain itu, pernyataan petinggi PDI Perjuangan yang dianggap menyinggung masyarakat Sumatera Barat menambah makin rendahnya

dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap PDI Perjuangan, khususnya di pemilihan gubernur 2020 lalu. Ketika mengumumkan calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan di pilkada 2020, Puan berharap semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila (“Celoteh Puan dan Jalan Terjal PDIP di Tanah Sumbar”). Hal ini menjadi polemik di masyarakat Sumatera Barat hingga menjadi perhatian nasional. Dampaknya adalah pengembalian rekomendasi dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung oleh pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni di pemilihan gubernur Sumatera Barat 2020. Kejadian ini menjadi penyumbang semakin menjauhnya dukungan masyarakat Sumatera Barat kepada PDI Perjuangan (“Celoteh Puan dan Jalan Terjal PDIP di Tanah Sumbar”).

Kesimpulan

Artikel ini telah menjelaskan bahwa kegagalan PDI Perjuangan merebut kemenangan di Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa faktor. PDI Perjuangan dianggap kurang populis bagi masyarakat Sumatera Barat dan kurang sensitif dengan karakteristik masyarakat Minangkabau yang kuat keislamannya. Rendahnya dukungan bagi PDI Perjuangan juga erat kaitannya dengan identitas PDI Perjuangan yang dipandang tidak sesuai dengan kultur Sumatera Barat. Ini berkaitan dengan pandangan bahwa PDI Perjuangan adalah partai nasionalis dengan ideologi marhaenisme, yang dianggap satu golongan dengan PKI yang keduanya sama-sama golongan abangan. Selain itu, faktor yang menjadi penyebab PDI Perjuangan tidak pernah menang di Sumatera Barat adalah rekam jejak partai ini yang kurang bagus di mata masyarakat Sumatera Barat. Bagi masyarakat Sumatera Barat, PDI Perjuangan tidak konsisiten dalam sikapnya membela rakyat. Saat di luar pemerintahan, PDI Perjuangan sangat kuat membela kepentingan rakyat, tapi saat di dalam pemerintahan, partai ini melakukan apa yang pernah ditolaknya. Rekam jejak ini juga dilihat pada banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kader PDI Perjuangan dan pernyataan Puan Maharani yang dianggap menyinggung masyarakat Sumatera Barat pada pemilihan gubernur 2020.

Rendahnya dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap PDI Perjuangan berdampak rendahnya perolehan suara Jokowi di provinsi pada pemilihan presiden di 2014 dan 2019. Kegagalan Jokowi di Sumatera Barat disebabkan oleh gaya kepemimpinannya yang tidak sesuai dengan selera masyarakat, kebijakan Jokowi yang belum dirasakan oleh masyarakat, dan terafiliasinya Jokowi dengan PDI Perjuangan. Anggapan bahwa

Jokowi belum tepat dalam menangani pandemik COVID-19 dan ia sedang membangun dinasti politik melalui keterlibatan anggota keluarganya dalam pilkada 2020 membuat semakin rendahnya dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap Jokowi dan partai pengusungnya, PDI Perjuangan.

Pendanaan

Penulis tidak menerima dukungan keuangan untuk penelitian ini, penulisan dan publikasinya.

Referensi

- Abidin, Asdar. 2011. "Analisis Kekalahan Calon Partai Golkar dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013: Studi Strategi Kampanye Politik." *KAREBA Jurnal Komunikasi* 1(1): 26-42.
- Afriandi, Fadli. 2019. "Perilaku Memilih Masyarakat Pasca Runtuhnya Dinasti Kekuasaan di Kutai Kartanegara." *Jurnal PolGov* 1(1): 57-87.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. 2014. "Jokowi dan Islam di Indonesia". Diakses pada 2 Pebruari 2021 dari (<https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/02/n6jfw47-jokowi-dan-islam-indonesia> pada 23 Februari 2021).
- Armia, Muhammad Sidiq. 2017. "Hubungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik". *Jurnal Review Politik* 7(1): 126-146.
- "Arsip Pemilu". Diakses 18 Pebruari 2021 dari (https://sumbar.kpu.go.id/index.php/arsip_pemilu).
- "Arsip Pilpres". Diakses 18 Pebruari 2021 dari (https://sumbar.kpu.go.id/index.php/arsip_pemilu/pilpres).
- Artis. 2012. "Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya* 9(1):59-80.
- "BPS: Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2019 Alami Perlambatan". Diakses 23 Pebruari dari ([https://www.antaranews.com/berita/1284670/bps-pertumbuhan-ekonomi-sumbar-2019-alami-perlambatan#:~:text=Padang%2C%20\(ANTARA\)%20%2D%20Badan,yang%20tumbuh%205%2C16%20persen](https://www.antaranews.com/berita/1284670/bps-pertumbuhan-ekonomi-sumbar-2019-alami-perlambatan#:~:text=Padang%2C%20(ANTARA)%20%2D%20Badan,yang%20tumbuh%205%2C16%20persen))

- Brubaker, Rogers. 2019. "Why Populism?". *Theory and Society* 46(5): 357-385.
- Budiarti, Linda, Muhtar Haboddin dan Andi Setiawan. 2018. "Politik Populisme Rendra Kresna". *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 3(2): 36-49.
- "Cantiknya Ibu Negara Iriana Jokowi Pakai Baju Adat Minang, Ini Kata Netizen". Diakses 19 Pebruari 2021 dari (<https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/17/cantiknya-ibu-negara-iriana-jokowi-pakai-baju-adat-minang-ini-kata-netizen>).
- "Celoteh Puan dan Jalan Terjal PDIP di Tanah Sumbar". Diakses 23 Pebruari 2021 dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200907174934-32-543718/celoteh-puan-dan-jalan-terjal-pdip-di-tanah-sumbar>).
- Colliot-Thelene, Catherine. 2019. "Populism as a Conceptual Problem". Pp. 17-26 dalam *Populism and the Crisis of Democracy, Volume 1: Concepts and Theory*, edited by Gregor Fitzzi, Jürgen Mackert, and Bryan S. Turner. London & New York: Routledge
- Edward, Sebastian. 2010. *Left Behind Latin America and The False Promise of Populism*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Effendi, Nursyirwan. 2014. "Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan dari Kemajemukan Budaya di Sumatera Barat". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2):107-115.
- Ekawati. 2017. "Vonis dan Kekalahan Ahok Berefek Luas Terhadap Elektabilitas Partai PDI Perjuangan". *Jurnal Legalitas* 2(1): 44-47.
- Eriyanti, Fitri. 2013. "Aspek Sosio-Budaya, Kebijakan Pemerintah, dan Mentalitas yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Sosial dalam Masyarakat Sumatera Barat". *Humanus* XII (1): 73-82.
- Fajari, Farizan. 2017. "Kekalahan Cambodia People's Party di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013". *Jurnal Politik* 2(2): 271-306.
- Fajri, Choirul dan Dani Fadillah. 2017. "Analisa Kegagalan Komunikasi Politik dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sleman (Studi Kasus PDI Perjuangan)". *Channel: Jurnal Komunikasi* 5(2):63-76.

- Febrianto, Nanda. 2019. "Ini yang dilakukan Jokowi untuk Sumatera Barat". Diakses 19 Pebruari 2021 dari (<https://www.tagar.id/ini-yang-dilakukan-jokowi-untuk-sumatera-barat>).
- Geertz, Clifford. 1976. *The Religion of Java*. Chicago dan London: University of Chicago Press.
- Gerald, Galang. 2019. "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS". *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 1(2):135-157.
- Haboddin, Muhtar. 2019. "Populisme, Politik Pertahanan, dan Pemimpin Lokal". *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1(2):173-180.
- Hakim, Rakhmat Nur. 2018. "Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa". Diakses 18 Pebruari 2021 dari (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>).
- Haris, Syamsuddin. 2014. "Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- "Hasil Hitung Suara Legislatif DPR RI 2019". Diakses dari (<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dpri/hitung-suara/>)
- "Hasil Pemilu". Diakses 18 Pebruari 2021 dari (https://sumbar.kpu.go.id/index.php/hasil_pemilu).
- Herdiansah, Ari Ganjar, Junaidi dan Heni Ismiati. 2017. "Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?". *Jurnal Wacana Politik* 2(1): 61-73.
- "ICW: Golkar Partai Terkorup di DPR/DPRD Periode 2014-2019". Diakses 23 Pebruari 2021 dari (<https://kumparan.com/kumparannews/icw-golkar-partai-terkorup-di-dpr-dprd-periode-2014-2019-1qqB8lR3Q3k/full>).

- “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada Tahun 2019 Mencapai 71,92”. Diakses dari (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html#:~:text=Pembangunan%20manusia%20di%20Indonesia%20terus,74%20persen%20dibandingkan%20tahun%202018>).
- Iqbal, Muhammad. 2020. “4 Anggota Keluarga Jokowi Ikut Pilkada 2020, Aji Mumpung?”. Diakses 23 Pebruari 2021 dari (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200114150454-4-129922/4-anggota-keluarga-jokowi-ikut-pilkada-2020-aji-mumpung>).
- Jannah, Selfie Miftahul. 2018. “Jokowi Bangun Infrastruktur Prioritas di Sumbar, Ini daftarnya”. Diakses 19 Pebruari 2021 dari (<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4259032/jokowi-bangun-infrastruktur-prioritas-di-sumbar-ini-daftarnya>).
- “Kementrian Agama Sumatera Barat dalam Angka”. Diakses dari (<https://rupawan.kemenag.go.id/s/NklhwQr752grNfe/download>).
- Kosasih, Ahmad. 2013. “Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”. *Humanus XII* (2):107-119.
- Maulida, Faishal Hilmy. 2018. “Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956–1961”. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya* 8(2):174-185.
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- “Megawati Bingung Kenapa Warga Sumbar Tak Suka PDIP”. Diakses 19 Pebruari 2021 dari (<https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/09/2020/megawati-bingung-kenapa-warga-sumbar-tak-suka-pdip/>).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terjemahan oleh Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Ningtyas, Ika. 2020. “[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ribka Tjiptaning Akui Semua Anak PKI Gabung PDIP?”. Diakses 23 Pebruari 2021 dari (<https://cekfakta.tempo.co/fakta/869/fakta-atau-hoaks-benarkah-ribka-tjiptaning-akui-semua-anak-pki-gabung-pdip>).

- Nuryani, Reni dan Priyatno Harsasto. 2018. "Kekalahan Seno Samodro dalam Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2015: Studi Kasus Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali". *Jurnal Politics and Government Studies* 7 (3): 11-20.
- "Peraturan Harus Sesuai Konstitusi, PDIP Tolak Perda Syariah." Diakses 23 Pebruari 2021 dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181119215026-32-347808/peraturan-harus-sesuai-konstitusi-pdip-tolak-perda-syariah>).
- "Perbandingan Kursi DPR RI Asal Sumbar Sejak Pemilu 1999 Hingga 2019". Diakses 18 Pebruari 2021 dari (<https://langgam.id/perbandingan-kursi-dpr-ri-asal-sumbar-sejak-pemilu-1999-hingga-2019/>).
- Rinaldi, Wahyu. 2015. *Kekalahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: FISIPOL Universitas Syiah Kuala.
- Riyanto, Agus. 2020. "Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: Path Dependence Repetition Kekalahan Partai Islam Indonesia dalam Pemilu Legislatif 1955 Hingga 2019". *Jurnal Politik Profetik* 8(2):186-217.
- Salim, Delmus Puneri dan Lies Kryati. 2017. "Politik Pendidikan Agama dan Perubahan Prilaku di Sumatera Barat". *Jurnal el-Hekam* II (1): 51-60.
- Sianipar, Imelda Masni Juniaty. 2015. "Strategi Pemimpin Populis Baru Indonesia Mencapai Kekuasaan". *Sociae Polites* 16(1):17-32.
- Sinombor, Sonya Helen. 2016. "Presiden Jokowi Laksanakan Shalat Id di Masjid Raya Sumbar". Diakses 19 Pebruari 2021 dari (<https://regional.kompas.com/read/2016/07/06/09511291/presiden.jokowi.laksanakan.shalat.id.di.masjid.raya.sumbar>).
- Sulaeman, Affan. 2015. "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah". *CosmoGov* 1(1):12-24.
- "Survei: Pemilih Rasional di Pilkada Sumbar Capai 46,5 Persen". Diakses 23 Pebruari 2021 dari (<https://www.antaranews.com/berita/1853472/survei-pemilih-rasional-di-pilkada-sumbar-capai-465-persen>).
- Sutisna, Agus. 2016. "Perspektif Marketing Politik: Kegagalan PDIP dan Partai Demokrat dalam Mempertahankan Posisi Sebagai Partai Pemenang Pemilu 1999 dan Pemilu 2009". *CosmoGov* 2(1):111-131.

- “Tanggapi Pernyataan Megawati, Pengamat Politik Unand: Pemilih di Sumbar Rasional”. Diakses 23 Pebruari 2021 dari (<https://kumparan.com/langkanid/tanggapi-pernyataan-megawati-pengamat-politik-unand-pemilih-di-sumbar-rasional-1u7xQNijf2u/full>).
- “Tradisi Perolehan Kursi DPR di Sumbar dalam Tiga Pemilu Terakhir.” Diakses 18 Pebruari 2021 dari (http://www.news.ranahweb.com/news.php?id_news=193/Kotak-Suara/view/Tradisi-Perolehan-Kursi-DPR-di-Sumbar-dalam-Tiga-Pemilu-Terakhir&kategori=Kotak%20Suara#.YC5p-RMza00).
- Weyland, Kurt. 2001. “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin America Politics”. *Comparative Politics* 34(1):1-22.
- Wulan, Annisa. 2018.” Bak Pengantin, Cantiknya Iriana Jokowi Pakai Baju Adat Minangkabau”. Diakses 19 Pebruari 2021 dari (<https://www.liputan6.com/fashion-beauty/read/3621343/bak-pengantin-cantiknya-iriana-jokowi-pakai-baju-adat-minangkabau>).

Tabel 1
Perbedaan Populisme Rasional dan Irasional

Karakteristik	Populisme Rasional	Populisme Irasional
Individu	Mengandalkan prestasi, kepemimpinan, dan keahlian	Mengandalkan karisma
Basis Politik	Kuat	Lemah
Ikatan pemimpin dan pendukung	Kuat	Lemah
Upaya	Membantu masyarakat dalam meningkatkan sumber daya	Distribusi uang, hadiah, subsidi, proteksi
Pendukung	masyarakat yang kritis dan rasional (anti pemimpin pengumbar janji)	Masyarakat kelas bawah, pernah kecewa oleh pemimpin sebelumnya

Sumber: Sianipar 2015:18

Tabel 2
Hasil Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan 2019 Tingkat Nasional

Tahun	Calon Presiden	Suara
2014	No. 1 Prabowo Subinto – M. Hatta Rajasa	62.576.444 (46,85%)
	No. 2 Joko Widodo – Jusuf Kalla	70.997.833 (53,15%)
2019	No. 1 Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin	84.654.894 (55,32%)
	No. 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno	68.359.086 (44,68%)

Sumber: KPU RI

Tabel 3
Hasil Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan 2019 di Sumatera Barat

Tahun	Calon Presiden	Suara
2014	No. 1 Prabowo Subinto – M. Hatta Rajasa	1.797.505 (76,92%)
	No. 2 Joko Widodo – Jusuf Kalla	539.308 (23,08%)
2019	No. 1 Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin	407.638 (14,09%)
	No. 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno	2.485.265 (85,91%)

Sumber: KPU Sumatera Barat

Tabel 4
Suara Nasional PDI Perjuangan pada Pemilu

Tahun Pemilu	Jumlah Suara	Keterangan Pemilu
1999	35.689.073	Menang
2004	21.026.629	Kalah
2009	14.600.091	Kalah
2014	23.681.471	Menang
2019	27.053.961	Menang

Sumber: KPU RI

